

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adjie, Habib, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Rajawali Pres, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dulaisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harsono, Budi, 2007, *PPAT Sejarah, Tuhas dan Kewenangannya*, Renvoi, Jakarta.
- _____, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi*, Djambatan, Jakarta.
- HS, H. Salim, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mustofa, 2010, *Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cetakan ke-6, Jakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notaris Di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Perangin, Efendi, 1982, *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta*, PT Esa Studi, Jakarta.
- Perangin, Efendi, 2007, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 2002, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mammudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Sumendro, 2019, *Bahan Ajar Kode Etik Notaris dan PPAT*, Program Studi Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sutopo, H.B., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif (Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian)*, UNS Press, Surakarta.

Taqdir Qodratilah, Meity, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Waluyo, Bambang 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan Prof. Moeljatno, S.H.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 Tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Anggaran Dasar Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2018.

C. JURNAL/ TESIS

Aditama, Purna Noor, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli”, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2018.

Jean Art Anggreani Alex, “Pengawasan Majelis Kehormatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Di Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

Momole, Gad, “Perilaku Calo dalam Pengurusan sertifikat Tanah (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman)”, *Tesis*, Program Studi Megister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2010.

Nurmairani, Hesti, “Peranan PPAT dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Kabupaten Bantul”, *Tesis* Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2016.

Winarsi, Sri, “Pengaturan Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum”, *Majalah Yuridika*, Volume 17, Nomor 2, Maret 2002.

D. INTERNET

Ady Thea DA, “Perlindungan Hukum Pekerja *Freelance* Dan Informal Perlu Diperkuat”, [Perlindungan Hukum Pekerja Freelance dan Informal Perlu Diperkuat \(hukumonline.com\)](#), diakses tanggal 10 Januari 2022.

Payung Hukum Pekerja *Freelance* di Indonesia - Hukum Line diakses pada 05 Oktober 2021 pukul 21.25 WIB

Pengertian freelance
<https://www.google.com/amp/s/dictionary.cambridge.org/amp/english/freelance> diakses pada tanggal 29 September 2021 pukul 08.20 WIB.